



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI

JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 82 A RANOMEETO KENDARI
TELEPON (0401) 3196383, FAKSIMILE (0401) 3196383
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.kendari@kkp.go.id

8 Januari 2026

Yth. Plt. Sekretaris BPPMHKP
Di Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor B.21/SPPMHKP.KDI/TU.210/I/2026

No	Jenis dokumen Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari	1 Laporan	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari,

Kasrida

Diterima tanggal :

Nama Penerima :

Tanda Tangan :



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2025

LAPORAN KINERJA

KANTOR & LABORATORIUM

SKIPM KENDARI

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI



[bkpmkendari](#)

Email : bkpm.kendari@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari (LKj Stasiun KIPM Kendari) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kendari berada di bawah Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022.

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Stasiun KIPM Kendari kepada para pemangku kepentingan sebagai sarana akuntabilitas publik, yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan sasaran strategis organisasi beserta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kendari.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari Tahun 2025 adalah Rencana Strategis Stasiun KIPM Kendari yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta



Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 beserta realisasinya. Secara umum, capaian kinerja Stasiun KIPM Kendari pada Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari pada masa yang akan datang.

Kendari, 6 Januari 2026

Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari,



Kasrida, S.St.Pi., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 PROFIL ORGANISASI.....	9
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM KENDARI.....	13
1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 VISI DAN MISI	16
2.2 TUJUAN	16
2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	17
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2025	21
2.5 PENGUKURAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	23
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI.....	25
3.3 REALISASI ANGGARAN	76
BAB IVP E N U T U P	78
4.1 KESIMPULAN	78
4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN	79
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025.....	19
Tabel 3. 1 Capaian kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025.....	24
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian	28
Tabel 3. 3 Realisasi IK-1 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024	30
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian	36
Tabel 3. 5 Realisasi IK-2 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024	37
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian	38
Tabel 3. 7 Realisasi IK-3 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024	40
Tabel 3. 8 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar IK 4.....	42
Tabel 3. 9 Realisasi IK-4 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024	43
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar IK 5.....	44
Tabel 3. 11 Realisasi IK-5 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024	46
Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 6	49
Tabel 3. 13 Realisasi IK-6 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024	50
Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 7	52
Tabel 3. 15 Realisasi IK-7 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	54
Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 8	55
Tabel 3. 17 Realisasi IK-8 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	56
Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 9	58
Tabel 3. 19 Realisasi IK-9 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	60
Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 10	61



Tabel 3. 21 Realisasi IK-10 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	62
Tabel 3. 22 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 11	64
Tabel 3. 23 Realisasi IK-11 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	66
Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 12	68
Tabel 3. 25 Realisasi IK-12 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	70
Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 13	71
Tabel 3. 27 Realisasi IK-13 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	73
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 14	74
Tabel 3. 29 Realisasi IK-14 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024	76
Tabel 3. 30 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2025.....	77
Tabel 3. 31 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2025.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kendari	12
Gambar 1. 2 Komposisi SDM Organisasi Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025.....	12
Gambar 2. 1 Peta Sasaran Program Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025.....	18
Gambar 3. 1 Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP	23
Gambar 3. 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester I	48
Gambar 3. 3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester II	48
Gambar 3. 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	52
Gambar 3. 5 Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	54
Gambar 3. 6 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester I .	57
Gambar 3. 7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester II	58
Gambar 3. 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	61
Gambar 3. 9 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	63
Gambar 3. 10 Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	67
Gambar 3. 11 Pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas	71

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun KIPM Kendari selama Tahun 2025. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Kendari dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Kendari terbagi menjadi 2 (dua) karena terjadi perubahan perjanjian kinerja di akhir tahun 2025 atau triwulan IV yaitu yang pertama untuk triwulan I, II dan III terdiri dari 3 Sasaran Program dan 14 Indikator Kinerja, yang kedua untuk triwulan IV tetap masih sama terdiri dari 3 Sasaran Program dan 14 Indikator Kinerja. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan target dan uraian indikator kinerja dan Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Kendari selama tahun 2025 adalah pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Stasiun KIPM Kendari selama tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	100
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	125
	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99	100
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	81,36
	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	75	81,36

standar		(Nilai)		
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92	89,15
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5	86,19
	8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	100
	9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	82	83,9
	10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86	86,86
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85	100
	12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76	100
	13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	75,95
	14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	3,36	3,923

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja Stasiun KIPM Kendari pada tahun 2025 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Kendari dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Kendari pada periode berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PROFIL ORGANISASI

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Kendari sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.92/MEN/2020 ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPPMHKP) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan pada tahap produksi primer dan pasca panen, serta penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk, dan pemenuhan persyaratan perdagangan domestik maupun internasional. sebagian besar wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Kendari menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu secara menyeluruh dan berkesinambungan pada seluruh rantai nilai hasil kelautan dan perikanan. Pengawasan dilaksanakan mulai dari tahap produksi primer, yang mencakup kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan, penanganan awal hasil perikanan, serta sarana dan prasarana pendukung, hingga tahap pasca panen, meliputi pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan peredaran hasil kelautan dan perikanan. Pendekatan pengawasan dilakukan secara berbasis risiko, mengedepankan pencegahan, serta didukung oleh pengujian laboratorium dan penerapan sistem ketertelusuran guna menjamin mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat maupun yang diperdagangkan secara global.

Dalam konteks pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Stasiun KIPM Kendari memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya hasil kelautan dan perikanan yang bermutu, aman, dan berdaya saing. Melalui pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu yang efektif pada tahap produksi primer dan pasca panen, Stasiun KIPM Kendari berkontribusi dalam menjaga kepercayaan konsumen, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan, serta memperkuat posisi produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Selain itu, peran Stasiun KIPM Kendari juga

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Tenggara melalui tersedianya produk perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah.

Stasiun KIPM Kendari mempunyai tugas antara lain:

Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan pada tahap produksi primer dan pasca panen, serta penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk, dan pemenuhan persyaratan perdagangan domestik maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Stasiun KIPM Kendari mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan mutu pada tahap produksi primer hasil kelautan dan perikanan
Meliputi pengawasan penerapan standar mutu dan keamanan pada kegiatan penangkapan, pembudidayaan, penanganan awal, serta sarana dan prasarana produksi primer hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pada tahap pasca panen
Meliputi pengawasan penanganan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan guna menjamin mutu dan keamanan produk sampai ke konsumen.
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Terhadap pemenuhan standar, persyaratan teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
Melalui pengujian laboratorium terhadap parameter mutu, keamanan pangan, dan persyaratan teknis lainnya sesuai standar nasional dan internasional.
5. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
Sebagai jaminan bahwa produk hasil kelautan dan perikanan memenuhi persyaratan untuk peredaran dalam negeri dan perdagangan internasional.
6. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, audit, dan pengambilan contoh
Pada unit produksi, Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana distribusi, serta rantai pasok hasil kelautan dan perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu.
7. Penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu
Pada pelayanan operasional dan laboratorium guna menjamin konsistensi, ketertelusuran, dan keandalan layanan pengawasan mutu.

8. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penerapan sistem jaminan mutu Kepada pelaku usaha di sektor produksi primer dan pasca panen hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan.
9. Pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan
Dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium
Untuk mendukung kegiatan pengujian, sertifikasi, dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
11. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mutu
Sebagai bahan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
12. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran
Di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT
Meliputi kepegawaian, keuangan, BMN, persuratan, dan dukungan administrasi lainnya.

Berdasarkan Permen KP Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi UPT di Lingkup BPPMHKP, termasuk Stasiun KIPM Kendari dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh 1 (satu) Pejabat Struktural yaitu Kepala Urusan Umum dan kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari saat ini berjumlah 20 orang pegawai, yang terdiri dari 12 orang PNS dan 8 orang PPPK.



Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kepala Urusan Umum

Koordinator dan Kelompok
Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kendari

REKAPITULASI BERDASARKAN PENDIDIKAN

1. 1033000000 - STASIUN KIPM KENDARI

1. 1033000000 - STASIUN KIPM KENDARI												
NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	
1	LAKI-LAKI	0	1	10	1	1	0	0	2	0	0	15
2	PEREMPUAN	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
TOTAL		0	2	11	1	2	0	0	2	0	0	18

2. TOTAL - SEMUA

2. TOTAL JENIS												
NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	
1	LAKI-LAKI	0	1	10	1	1	0	0	2	0	0	15
2	PEREMPUAN	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
TOTAL		0	2	11	1	2	0	0	2	0	0	18

REKAPITULASI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN

1. 1033000000 - STASIUN KIPM KENDARI

E. 1033000000 - STASIUN RIFM KENDARI																							
NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN																					
		Ia	Ib	Ic	Id	JML	IIa	IIb	IIc	IId	JML	IIIa	IIId	IIId	JML	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	JML	TOTAL	
1	LAKI-LAKI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	4	8	0	0	0	0		0	15
2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1	3
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	5	9	1	0	0	0		1	18

2. TOTAL - SEMUA

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN																			JML	TOTAL
		Ia	Ib	Ic	Id	JML	IIa	IIb	IIc	IId	JML	IIIa	IIId	IIId	JML	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	JML	TOTAL
1	LAKI-LAKI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	4	8	0	0	0	0	0	15
2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	5	9	1	0	0	0	1	18

REKAPITULASI BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

1. 1033000000 - STASIUN KIPM KENDARI

NO	JENIS KELAMIN	JABATAN									JABATAN FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V			
1	LAKI-LAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	15
2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	7	18

2. TOTAL - SEMUA

NO	JENIS KELAMIN	JABATAN									JABATAN FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V			
1	LAKI-LAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	15
2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	7	18

Gambar 1. 2 Komposisi SDM Organisasi Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan / monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Kendari dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi Stasiun KIPM Kendari dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kendari. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM KENDARI

Peranan strategis Stasiun KIPM Kendari sebagai unit pelayanan teknis Badan KIPM dalam Renstra SKIPM Kendari 2020-2024 dalam rangka mendukung visi

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, secara langsung mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam upaya melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama/penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Arah kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Kendari diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka Stasiun KIPM Kendari menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan; Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan adalah masuk dan tersebarnya HPIK yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati kelautan dan perikanan. Aktualisasi Stasiun KIPM Kendari dalam mengantisipasi ini adalah dengan melakukan pencegahan masuknya HPIK ke wilayah RI dan penyebarannya dari satu area ke area lain yang melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Kepmen KP Nomor 76/KEPMEN-KP/2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, Stasiun KIPM Kendari bertugas untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya agar tetap terjaga dan berproduktifitas tinggi baik kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya Stasiun KIPM Kendari telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam hal agar produk perikanan sebagai bahan pangan yang tersedia aman untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir melalui monitoring mutu ikan pada sentra produksi perikanan, termasuk pelabuhan dan unit supplier, inspeksi terhadap produk perikanan

impor yang akan didistribusikan ke unit pengolahan ikan maupun pasar domestik serta sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Summary Executive**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama tahun 2025.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2020-2024 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2 TUJUAN

Tujuan pembangunan SKIPM Kendari merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Kendari sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab

padapencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan danperikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Kendari.

2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkatkeberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikatoryang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Stasiun KIPM Kendaritelah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan *Balanced Score Card (BSC)* yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis BPPMHKP secara nasional sebagaimana tercantum pada gambar 2.1

PETA SASARAN PROGRAM STASIUN KIPM KENDARI TAHUN 2025

Gambar 2. 1 Peta Sasaran Program Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025

Peta strategis Stasiun KIPM Kendari tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari Eselon IV ke Eselon V, Pelaksana Koordinasi hingga ke seluruh pegawai Stasiun KIPM Kendari. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Kendari dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target dari setiap indikator kinerja Stasiun KIPM Kendari sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			2025
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5
	8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100
	9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	82
	10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85
	12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76



	13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
	14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	3,36

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2021 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Stasiun KIPM Kendari telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan Kepala Stasiun KIPM Kendari. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 3 Sasaran Program, yang pencapaiannya diukur dengan 17 dan 13 Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja BPPMHKP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025 terdiri dari sasaran-sasaran program di mana setiap SP menjadi basis dalam penentuan Indikator Kinerja.

2.5 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

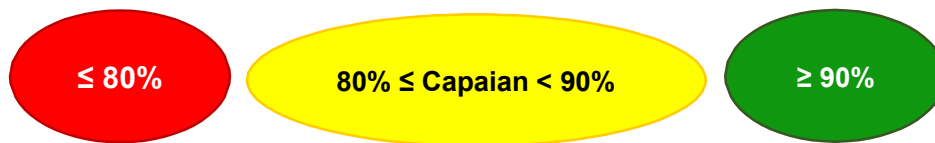
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

c) *Polarisasi Stabilize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

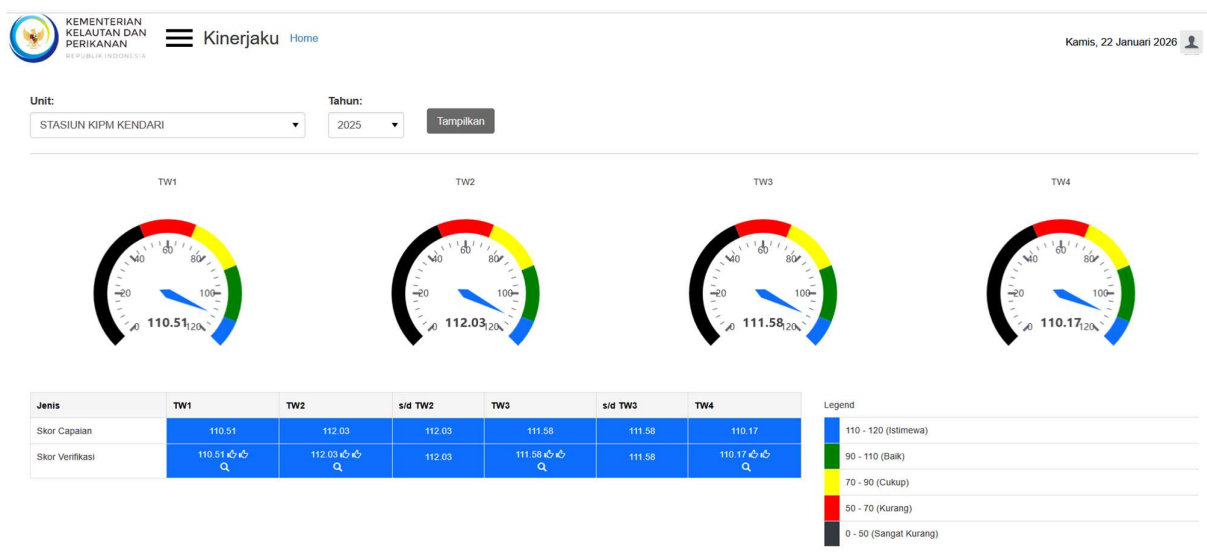


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja pada tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Kendari Triwulan I sebesar 110,51% (kategori Istimewa), Triwulan II sebesar 112,03% (kategori Istimewa), Triwulan III sebesar 111,58% (kategori Istimewa) dan Triwulan IV sebesar 110,17% (kategori Istimewa). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Stasiun KIPM Kendari sebagai organisasi UPT BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Kendari tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	100	120
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	125	120
	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99	100	101,01
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	81,36	108,48
	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	81,36	108,48
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92	89,15	96,90
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5	86,19	120
	8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	100	100
	9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	82	83,9	102,32
	10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86	86,86	100,99
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85	100	117,65
	12.	Persentase rencana umum pengadaan	76	100	120

	PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)			
13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	75,95	108,50
14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	3,36	3,923	116,67

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Seluruh produk perikanan, baik yang dikonsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor, memiliki mutu yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sistem pengendalian yang efektif terhadap kualitas hasil kelautan dan perikanan sejak dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, serta mendukung kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya pembinaan bagi pelaku usaha agar menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dan pengolahan yang higienis secara konsisten.

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
 - Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku .
 - Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara Pengukuran :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Capaian Kinerja Selama tahun 2025 untuk IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sesuai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu 70%, dilaksanakan Semester I Stasiun KIPM Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan, Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di PPS Kendari pada 4 unit kapal perikanan dan PPI Sodohoa Kendari pada 3 unit kapal perikanan. Output kegiatan dengan total 7 kapal yang diinspeksi, 7 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 7 sertifikat telah terbit pada bulan Juni 2025, total capaian 100% dari target pada 70%.

$$\%X = \frac{0 + 0 + 0 + 0 + 100}{1} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Pada Semester II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat CBIB Pembudidaya Ikan;
 - b. Sertifikat CPIB Pada Pembenihan;
 - c. Sertifikat CPIB Kapal Perikanan.
1. Sertifikat CBIB Pembudidaya Ikan adalah Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Kel.Mondoe, Kec.Palangga, Kab.Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Stasiun KIPM Kendari Bersama Staf dari Dinas Perikanan Kab.Konawe Selatan dan penyuluh perikanan Kab. Konawe Selatan. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah 1 Ruang Lingkup (Kode 03254) dengan komoditas Udang Vannamei.
 2. Sertifikat CPIB Pada Pembenihan adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CPIB dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu Kel.Marga Cinta, Kec. Moramo; Kel.Wawouru, Kec. Palangga; Kel.Ranomeeto, Kec.Ranomeeto di Kabupaten Konawe Selatan dan 1 di Kel.Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur Stasiun KIPM Kendari Bersama Staf dari Dinas Perikanan Kab.Konawe, Kab. Konawe Selatan dan penyuluh perikanan Kab.Konawe dan Kab.Konawe Selatan Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah 13 Ruang Lingkup (Kode 03226) dengan komoditas ikan Benih Ikan Nila, Benih Ikan Ie, Benih Ikan Mas, Benih Ikan Gurame dan Ikan Koi.
 3. Sertifikat CPIB Kapal Perikanan adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari dengan 5 unit kapal perikanan dan di Tempat pendaratan Ikan Sodohoa

kendari dengan 15 unit kapal perikanan Dengan total 20 kapal yang diinspeksi. Output dari kegiatan ini terdiri dari, 7 (Tujuh) Sertifikat CBIB Pembudidaya Ikan dengan masa berlaku 4 (Empat) tahun dan telah terbit di bulan Desember 2025, 13 (Tiga Belas) Sertifikat CPIB Pada Pembenihan Sertifikat CBIB dengan masa berlaku 4 (Empat) tahun dan telah terbit di bulan Juli & Oktober 2025, 20 (Dua Puluh) Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 (Dua) tahun. Sebanyak 20 sertifikat telah terbit pada bulan Juni s.d November 2025.

$$\%X = \frac{CBIB\ Pembenihan\ 13\ (100\%)+CPIB\ Pembudidaya\ 7\ (100\%)+CPI\ Kapal\ 20\ (100\%)}{3} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan IK 1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	100	120

Tingkat efektivitas kinerja diukur melalui perbandingan antara realisasi capaian dan target IKU, dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Kinerja} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,86\%$$

Pelaksanaan IKU *Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan* pada UPT Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat berhasil, dengan capaian 100%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 70%.

Keberhasilan ini ditandai dengan:

1. Terlaksananya seluruh kegiatan sertifikasi baik pada Semester I maupun Semester II sesuai rencana.
2. Peningkatan cakupan sertifikasi dari hanya 1 jenis sertifikasi pada Semester I menjadi 3 jenis sertifikasi pada Semester II.

3. Kepatuhan pelaku usaha sektor produksi primer terhadap standar mutu dan keamanan pangan yang semakin meningkat.
4. Seluruh sertifikat diterbitkan tepat waktu sesuai jadwal inspeksi dan proses evaluasi.

Tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini. Sebaliknya, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan, baik dari sisi:

- jumlah unit yang disertifikasi,
- variasi jenis sertifikasi,
- serta luas wilayah layanan (lintas kabupaten/kota).

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain:

1. Sinergi lintas sektor antara Stasiun KIPM Kendari dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan.
2. Kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan teknis sertifikasi.
3. Kompetensi dan komitmen inspektur dalam melaksanakan inspeksi lapangan secara profesional dan objektif.
4. Perencanaan kegiatan yang efektif, sehingga seluruh target dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

Dalam rangka mengantisipasi potensi kendala lapangan, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Penjadwalan inspeksi secara fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan dan kesiapan pelaku usaha.
2. Pendampingan teknis pra-sertifikasi, khususnya bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan sertifikasi.
3. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.
4. Optimalisasi sumber daya internal, terutama dalam penugasan inspektur.

Pelaksanaan kegiatan IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp16.500.000, yang telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Output yang dihasilkan jauh melebihi target kinerja dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas.
2. Pemanfaatan kolaborasi lintas instansi, sehingga mengurangi kebutuhan biaya tambahan.
3. Penggabungan lokasi inspeksi dalam satu wilayah kerja untuk menekan biaya perjalanan dinas.

4. Optimalisasi sumber daya manusia internal tanpa penambahan biaya eksternal.

Dengan anggaran tersebut, Stasiun KIPM Kendari berhasil menerbitkan:

- 7 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan (Semester I),
- 7 Sertifikat CBIB Pembudidaya Ikan,
- 13 Sertifikat CPIB Pembenihan,
- 20 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan (Semester II).

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari merekomendasikan:

1. Peningkatan target IKU secara bertahap, sejalan dengan kapasitas layanan dan potensi wilayah.
2. Penguatan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya usaha skala kecil dan menengah.
3. Peningkatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan di sentra produksi primer.
4. Pengembangan sistem monitoring pasca-sertifikasi untuk menjaga keberlanjutan kepatuhan.
5. Optimalisasi dukungan anggaran dan SDM, guna memperluas cakupan sertifikasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Dalam kegiatan Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga kegiatannya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya demikian dengan terlaksananya kegiatan. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada table 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3 Realisasi IK-1 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2019-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	-	-	-	-	100	70	100	70	100

2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: a. Standar Nasional Indonesia (SNI); b. Standar Internasional (Codex Alimentarius); c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Selama Tahun 2025 Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

a. Sertifikat HACCP

Sertifikasi HACCP dari 3 Unit Pengolahan Ikan yaitu: PT. Yanagi Histalaraya dengan jenis produk Frozen Pelagic Fish, Frozen Shrimp dan Frozen Chephalapods tanggal inspeksi 9 Januari 2025, PT. Kelola Mina Laut dengan jenis produk Frozen Chephalapods tanggal inspeksi 10 Februari 2025, PT. Andalan Nelayan Indonesia dengan jenis produk Pasteurized Crabmeat tanggal Inspeksi 7 Februari 2025.

b. Sertifikat SKP

7 Sertifikat SKP dari 4 Unit Pengolahan Ikan yaitu: PT. Harapan Mujur Samudera jenis produk tuna beku, kerang beku, ikan pelagis beku, cephalopoda beku tanggal sertifikat 3 Maret 2025 s.d 3 Maret 2027, PT. Andalan Nelayan Indonesia dengan jenis produk daging rajungan pasteurisasi tanggal sertifikat 30 Januari 2025 s.d 30 Januari 2027, PT. Abadi Makmur Ocean jenis produk ikan pelagis bernilai tambah beku tanggal sertifikat 3 Maret 2025 s.d 3 Maret 2027, CV Anugerah Dua Putra jenis produk udang segar tanggal sertifikat 3 Maret 2025 s.d 3 Maret 2027.

A (Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP) = **100%**

B (Persentase Penerbitan Sertifikat SKP) = **63,64%**

$$\%X = \frac{A+B}{Xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 63,64}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \mathbf{81,82\%}$$

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari telah melakukan sertifikasi terhadap 2 (dua) jenis sertifikasi yaitu :

a. Sertifikat HACCP

7 Sertifikat HACCP dari 4 Unit Pengolahan Ikan yaitu : CV. Anugerah Dua Putra dengan jenis produk *Fresh Shrimp* (tanggal inspeksi 21 April 2025), CV. Anugrah Bahari Kendari dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 19 Mei 2025), PT. Asia Bahari Fishery dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 04 Juni 2025), dan PT. Grahamakmur Ciptapratama dengan jenis

produk *Frozen Shrimp* (tanggal inspeksi 19 Mei 2025) dan *Frozen Demersal Fish* (tanggal inspeksi 18 Juni 2025).

b. Sertifikat SKP

21 Sertifikat SKP dari 6 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Asia Bahari Fishery dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 24 Maret 2025), CV. Anugrah Bahari Kendari dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 27 Maret 2025), CV. Alfaraya Mitra Bahari dengan jenis produk *Frozen Pelagic Fish*, *Frozen Demersal Fish*, dan *Frozen Cephalopods* (tanggal inspeksi 22 April 2025), KSU Adi Jaya Lestari dengan jenis produk *Fresh Shellfish*, *Frozen Shellfish*, *Frozen Cephalopod*, *Frozen Tuna*, *Frozen Sea Snail*, *Frozen Pelagic Fish*, dan *Frozen Demersal Fish*, PT. Arta Mina Jaya dengan jenis produk *Fresh Tuna*, *Frozen Tuna*, *Frozen Cephalopods*, *Frozen Pelagic Fish* dan *Frozen Demersal Fish* dan *Fresh Demersal Fish*, PT. Andalan Nelayan Indonesia dengan jenis produk *Pasteurized Crab Meat* (tanggal inspeksi 18 Juni 2025).

A (Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP) = **100%**

B (Persentase Penerbitan Sertifikat SKP) = **72,41%**

$$\%X = \frac{A+B}{Xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 72,41}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \mathbf{86,21\%}$$

Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari telah melakukan sertifikasi terhadap 2 (dua) jenis sertifikasi yaitu:

a. Sertifikat HACCP

Sertifikat HACCP dari 3 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Andalan Nelayan Indonesia dengan jenis produk *Pasteurized Crab Meat* (tanggal inspeksi 11 Juli 2025), PT. Dharma Samudera Fishing Industries dengan jenis produk *Frozen Pelagic Fish*, *Frozen Demersal Fish*, *Frozen Cephalopods*, dan *Frozen Tuna* (tanggal inspeksi 20 Agustus 2025), dan PT. Jala Crabindo International dengan jenis produk *Pasteurized Crab Meat* (tanggal inspeksi 28 Agustus 2025).

b. Sertifikat SKP

18 Sertifikat SKP dari 5 Unit Pengolahan Ikan yaitu : Koperasi Berkah Samudera Kendari dengan Jenis produk Ikan Pelagis Beku, Daging Kerang Beku, Tuna Beku, (Tanggal inspeksi 25 Juni 2025), PT. Lautan Sakti Jaya

dengan jenis produk udang beku, Cephalopoda beku, Ikan Pelagis Beku, Ikan Demersal Beku, dan Ikan Bandeng Bekudan (tanggal inspeksi 9 Juli 2025), PT. Dharma Samudera Fishing Industries dengan jenis produk Ikan Pelagis Beku, Cephalopoda Beku, Tuna Beku, Ikan Demersal Beku (tanggal inspeksi 17 Juli 2025), PT. Grahamakmur Ciptapratama dengan jenis produk Ikan Demersal Beku, Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Daging Rajungan, Udang Beku, Gurita Beku (tanggal inspeksi 13 Agustus 2025), dan PT. Jala Crabindo International dengan jenis produk Pasteurized Crab Meat (Tanggal inspeksi 12 Agustus 2025).

A (Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP) = **100%**

B (Persentase Penerbitan Sertifikat SKP) = **94,74%**

$$\%X = \frac{A+B}{Xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100+94,74}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \mathbf{97,37\%}$$

Pada Triwulan IV tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

b. Sertifikat HACCP

9 Sertifikat HACCP dari 4 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Sultratuna Samudra dengan jenis produk Frozen Cephalopods, Frozen Cooked Cephalopods, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Shrimp (tanggal inspeksi 28 – 29 Okt 2025), PT. Kendari Bay Seafood dengan jenis produk Pasteurized Crab Meat (tanggal inspeksi 15 Nov 2025), PT. Grahamakmur Ciptapratama dengan jenis produk Frozen Cephalopods (tanggal inspeksi 25 Nov 2025), dan CV. Anugerah Dua Putra dengan jenis produk Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish dan Fresh Cephalopods.

c. Sertifikat SKP

4 Sertifikat SKP dari 2 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Kendari Bay Seafood dengan jenis produk Pasteurized Crab Meat (tanggal inspeksi 06 Nov 2025), dan CV. Anugerah Dua Putra dengan Jenis produk Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish dan Fresh Cephalopods (05 Des 2025).

A (Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP) = **130%**

B (Persentase Penerbitan Sertifikat SKP) = **120%**

$$\%X = \frac{A+B}{Xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{130+120}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \mathbf{125\%}$$

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran kegiatan SKP sebesar Rp. 32.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.350.000 atau 100% dan kegiatan HACCP sebesar Rp.35.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. 35.960.000 atau 100%

Secara keseluruhan, tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini. Sebaliknya, terjadi tren peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari triwulan ke triwulan.

Dalam rangka mengatasi kendala dan meningkatkan capaian kinerja, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Pendampingan teknis intensif kepada UPI dalam pemenuhan persyaratan HACCP dan SKP.
2. Koordinasi aktif dengan pelaku usaha untuk penjadwalan inspeksi yang lebih efektif.
3. Penyederhanaan alur pelayanan internal tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas proses sertifikasi.
4. Optimalisasi peran inspektur melalui pengaturan penugasan yang efisien dan terencana.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi pada IKU ini didukung oleh:

- Pagu Anggaran Kegiatan SKP sebesar Rp32.350.000, dengan realisasi Rp32.350.000 (100%)
- Pagu Anggaran Kegiatan HACCP sebesar Rp35.960.000, dengan realisasi Rp35.960.000 (100%)

Penggunaan anggaran tersebut dinilai efisien dan optimal, karena:

1. Seluruh anggaran digunakan untuk kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian IKU.
2. Output yang dihasilkan melampaui target kinerja, khususnya pada Triwulan IV.
3. Efisiensi dicapai melalui penggabungan lokasi inspeksi, pemanfaatan SDM internal, dan koordinasi lintas sektor sehingga tidak memerlukan biaya tambahan.

4. Tidak terdapat pemborosan anggaran dan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan.

Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi HACCP dan SKP kepada UPI, khususnya UPI skala kecil dan menengah.
2. Memperkuat pendampingan pra-sertifikasi agar kesiapan pelaku usaha lebih merata sejak awal tahun.
3. Meningkatkan target IKU secara bertahap, sejalan dengan tren peningkatan kinerja dan potensi wilayah.
4. Mengembangkan sistem monitoring pasca-sertifikasi untuk menjaga konsistensi penerapan standar mutu dan keamanan pangan.
5. Mempertahankan efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap mengutamakan kualitas layanan sertifikasi.

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan IK 2

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	125	120

Dalam kegiatan Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga kegiatannya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya demikian dengan terlaksananya kegiatan. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada table 3.5 berikut ini:

Tabel 3. 5 Realisasi IK-2 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2019-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	-	-	-	-	100	70	125	100	125

3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cara Pengukuran :

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
 A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
 B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Selama Tahun 2025 Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari jumlah HC yang diterbitkan yaitu sebanyak 248 sertifikat dan tidak ada yang ditolak.

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari jumlah SMKHP yang diterbitkan yaitu sebanyak 212 sertifikat dan tidak ada yang ditolak.

Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari jumlah SMKHP yang diterbitkan yaitu sebanyak 285 sertifikat dan tidak ada yang ditolak.

Pada Triwulan IV tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari jumlah HC yang diterbitkan yaitu sebanyak 263 sertifikat dan tidak ada yang ditolak.

Untuk melaksanakan kegiatan belum didukung pagu anggaran kegiatan Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari karena sebagian terdapat blokir anggaran efisiensi kebijakan pemerintah pusat namun kegiatan tetap dilaksanakan.

Jumlah Total Sertifikat selama tahun 2025 yaitu 1.008 sertifikat atau Output Total capaian 100% karena Jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat kesehatan sama dengan jumlah Jumlah HC ekspor mutu capaiannya 100% karena jumlah Frekuensi HC ekspor yang memenuhi syarat mutu sama dengan jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan dan tidak ada penolakan dari negara tujuan. Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan IK 3

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99	100	100

Tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini. Fluktuasi jumlah sertifikat antar triwulan lebih dipengaruhi oleh dinamika volume ekspor dan permintaan negara tujuan, bukan oleh penurunan kualitas layanan atau kinerja pengawasan.

Meskipun pada tahun 2025 kegiatan ini tidak sepenuhnya didukung oleh pagu anggaran, akibat adanya pemblokiran anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat, Stasiun KIPM Kendari tetap mampu melaksanakan kegiatan secara optimal melalui beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Optimalisasi sumber daya manusia internal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat.
2. Prioritisasi layanan ekspor, khususnya terhadap komoditas strategis dan berisiko tinggi.
3. Pemanfaatan sistem layanan elektronik untuk mempercepat proses pelayanan tanpa menambah beban biaya.

4. Penguatan koordinasi dengan pelaku usaha ekspor, sehingga dokumen dan persyaratan dapat dipenuhi secara tepat waktu dan lengkap.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini tercermin dari:

1. Tetap tercapainya target kinerja 100% meskipun terdapat keterbatasan dukungan anggaran.
2. Tidak adanya penolakan dari negara tujuan ekspor, yang menunjukkan efektivitas pengawasan mutu dan kesehatan.
3. Pemanfaatan sarana, prasarana, dan SDM yang ada secara maksimal tanpa penambahan biaya operasional.
4. Efektivitas proses pelayanan, ditunjukkan dengan kelancaran penerbitan 1.008 sertifikat sepanjang tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Stasiun KIPM Kendari mampu menjaga kinerja layanan ekspor secara efektif, efisien, dan akuntabel, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja IKU pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan serta merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Mengusulkan kembali dukungan anggaran secara proporsional untuk menjamin keberlanjutan layanan ekspor.
2. Meningkatkan sistem pengawasan mutu dan kesehatan hasil perikanan sejak hulu hingga hilir.
3. Memperkuat pendampingan kepada eksportir, khususnya terkait persyaratan spesifik negara tujuan.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pasca-ekspor, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penolakan di negara tujuan.
5. Mempertahankan kualitas layanan sertifikasi, agar rasio penerimaan ekspor tetap terjaga pada 100%.

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada table 3.7 berikut ini:

Tabel 3. 7 Realisasi IK-3 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2019-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	100	100	100	100	99	100	100	100

2) Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rantai proses penanganan hasil kelautan dan perikanan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar mutu yang berlaku. Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan dilakukan agar setiap produk perikanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan pangan, layak konsumsi, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional, seperti SNI, HACCP, ISO 17025, 17020, 22000, dan ketentuan negara tujuan ekspor.

Pelaksanaan pengendalian dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain inspeksi, audit internal, verifikasi penerapan sistem jaminan mutu di unit pengolahan hasil perikanan, serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium uji mutu. Selain itu, kegiatan ini mencakup pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha agar mereka mampu menerapkan sistem jaminan mutu dengan benar dan berkelanjutan. Pengendalian mutu yang konsisten juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, auditor, dan petugas teknis agar memiliki kompetensi sesuai standar profesi dan mampu menjaga kredibilitas hasil pengawasan.

Dengan terselenggaranya sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan yang baik dan konsisten, diharapkan produk hasil kelautan dan perikanan Indonesia memiliki mutu yang kompetitif, aman untuk dikonsumsi, serta diterima di pasar nasional maupun internasional. Penerapan sistem ini secara berkelanjutan juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan mitra dagang terhadap kualitas produk perikanan Indonesia, mendorong peningkatan ekspor,

serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian di laboratorium official control

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ruang Lingkup; | 5. Persyaratan Sumber Daya; |
| 2. Acuan Normatif; | 6. Persyaratan Proses; |
| 3. Persyaratan Umum; | 7. Persyaratan Sistem Manajemen |
| 4. Persyaratan Struktural; | |

Cara Pengukuran:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \text{Rata rata} \\ \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} &= \text{Nilai tingkat pemenuhan ke } - 1, 2, 3, \dots, n \\ &= \text{banyaknya nilai tingkat pemenuhan} \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dilaksanakan pada periode Triwulan III dengan hasil adalah 81,36 atau 108,48% dari Target 75 sehingga tercapai

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran Rp. 146.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.177.000 atau 94,64% dan disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar IK 4

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	70	81,94	117,08

Pelaksanaan IKU *Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium* pada UPT Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat berhasil. Nilai capaian yang diperoleh sebesar 81,36, atau 108,48% dari target yang ditetapkan sebesar 75.

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu laboratorium telah berjalan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, meskipun terdapat keterbatasan dukungan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas penerapan sistem mutu, khususnya dalam aspek pengendalian dokumen, kompetensi personel, validasi metode pengujian, serta pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium.

Tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini. Seluruh elemen sistem manajemen mutu laboratorium dapat diterapkan dengan baik dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai evaluasi.

Dalam rangka mengantisipasi keterbatasan anggaran akibat adanya blokir efisiensi, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Penyesuaian prioritas kegiatan, dengan memfokuskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan persyaratan sistem manajemen mutu.
2. Optimalisasi sumber daya internal, khususnya dalam pelaksanaan audit internal, pengendalian mutu, dan pemeliharaan peralatan.
3. Pemanfaatan pelatihan dan bimbingan teknis internal, untuk meningkatkan kompetensi personel tanpa menambah beban biaya.
4. Penguatan koordinasi internal antar unit kerja untuk menjaga konsistensi penerapan sistem mutu.

Pelaksanaan kegiatan IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp146.000.000, dengan realisasi sebesar Rp138.177.000 atau 94,64%. Selisih realisasi anggaran disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan kegiatan serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Capaian kinerja yang melampaui target, meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.
2. Penggunaan anggaran secara tepat sasaran, terutama pada kegiatan prioritas yang mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
3. Tidak adanya penurunan kualitas layanan laboratorium, meskipun terdapat pembatasan anggaran.
4. Pengelolaan sumber daya yang efektif, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standar yang berlaku.
2. Meningkatkan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan berkelanjutan dan berbagi pengetahuan internal.
3. Mengoptimalkan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium, agar keandalan hasil pengujian tetap terjaga.
4. Mengusulkan dukungan anggaran secara proporsional, guna mendukung peningkatan kualitas sistem mutu secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi internal, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3. 9 Realisasi IK-4 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2019-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	-	-	-	-	81,94	70	81,94	70	81,94

2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Pengukuran:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, .., n
n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dilaksanakan pada periode Triwulan IV dengan hasil adalah 81,36 atau 108,48% dari Target 75 sehingga tercapai.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.00.000 atau 100% dan disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar IK 5

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	70	81,94	117,08

Pelaksanaan IKU *Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi* pada UPT Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 dilaksanakan pada Triwulan IV dan menunjukkan kinerja sangat berhasil. Nilai yang diperoleh sebesar 81,36, atau 108,48% dari target yang ditetapkan sebesar 75, sehingga IKU ini tercapai dan melampaui target.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi telah berjalan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, meskipun pelaksanaan kegiatan berada pada periode akhir tahun dan dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini, dan capaian yang melampaui target menunjukkan peningkatan kualitas penerapan sistem mutu lembaga inspeksi.

Dalam rangka menjaga keberhasilan pelaksanaan IKU di tengah keterbatasan anggaran, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV dengan fokus pada pemenuhan unsur-unsur utama sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.
2. Optimalisasi sumber daya internal, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi, pengendalian dokumen, dan pemantauan penerapan sistem mutu.
3. Penguatan koordinasi internal, guna memastikan seluruh persyaratan mutu tetap terpenuhi secara konsisten.
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas penerapan sistem manajemen mutu.

Pelaksanaan kegiatan IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.000.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.000.000 atau 100%. Realisasi anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Capaian kinerja yang melampaui target, meskipun anggaran relatif terbatas.
2. Penggunaan anggaran secara tepat sasaran, yang difokuskan pada kegiatan inti penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.
3. Tidak adanya penurunan kualitas layanan inspeksi, meskipun kegiatan dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan anggaran.
4. Optimalisasi SDM dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai rencana.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai standar yang berlaku.
2. Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi internal, sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Mengusulkan dukungan anggaran yang memadai dan proporsional, guna mendukung peningkatan kualitas sistem mutu lembaga inspeksi.
5. Mengoptimalkan perencanaan kegiatan sejak awal tahun, agar pelaksanaan penerapan sistem mutu dapat dilakukan lebih merata sepanjang tahun anggaran.

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3. 11 Realisasi IK-5 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2019-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	-	-	-	-	81,94	70	81,94	70	81,94

3) Sasaran Kegiatan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Melalui sasaran ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan mutu yang adaptif terhadap perkembangan industri, berbasis teknologi informasi, dan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat layanan sertifikasi mutu, serta memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjamin mutu dan

keamanan produk kelautan dan perikanan. Dengan demikian, dapat lebih responsif terhadap dinamika global, mempercepat waktu respons terhadap masalah mutu, serta meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar nasional maupun internasional, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Pada Semester I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sebesar 81,90 dari 85 atau 96,35% belum memenuhi target. Dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KENDARI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	78.41	100.00	100.00	100.00	78.55	49.15	81.90	100%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	10.00	10.00	7.86	12.29				
					Nilai Aspek	89.21		94.64				49.15				

Gambar 3. 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester I

Stasiun KIPM Kendari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sebesar 89,15 atau 96,90% dari 92 belum memenuhi target. Dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KENDARI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	70.52	99.38	60.00	100.00	94.48	93.00	89.15	100%	0.00	89.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	19.88	6.00	10.00	9.45	23.25				
					Nilai Aspek	85.26		88.47				93.00				

Gambar 3. 3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester II

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 6

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92	89,15	96,90

Pelaksanaan IKU *Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* pada UPT Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang mengalami peningkatan signifikan antara Semester I dan Semester II, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Pada Semester I Tahun 2025, nilai IKPA yang dicapai sebesar 81,90 dari target 85 atau 96,35%, sehingga belum memenuhi target kinerja. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator IKPA yang belum optimal, antara lain ketepatan waktu penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran yang belum merata pada awal tahun, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Pada Semester II Tahun 2025, nilai IKPA meningkat secara signifikan menjadi 96,90, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 92 (sesuai pembobotan/target akhir tahun). Peningkatan nilai IKPA ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi target secara penuh.

Secara umum, tidak terjadi kegagalan total dalam pelaksanaan IKPA, namun capaian pada kedua semester menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan anggaran agar kinerja dapat memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan nilai IKPA, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada Semester II.
2. Peningkatan koordinasi internal antara pejabat pengelola keuangan (PPK, PPSPM, Bendahara, dan operator SAKTI).
3. Perbaikan ketepatan waktu penyampaian dokumen keuangan, khususnya terkait komitmen dan pembayaran.

4. Penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan, agar selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan IKPA tercermin dari:

1. Peningkatan nilai IKPA yang signifikan pada Semester II, tanpa adanya tambahan anggaran.
2. Optimalisasi sumber daya manusia pengelola keuangan, melalui pembagian tugas dan pengawasan yang lebih efektif.
3. Pemanfaatan sistem aplikasi keuangan pemerintah (SAKTI dan OM-SPAN) secara maksimal untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tetap berjalan, meskipun terdapat penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Untuk meningkatkan nilai IKPA pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sejak awal tahun, agar penyerapan lebih merata dan tepat waktu.
2. Memperkuat pengendalian internal pengelolaan anggaran, khususnya pada indikator-indikator IKPA yang masih rendah.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, melalui pelatihan teknis dan pembaruan regulasi.
4. Mempercepat proses administrasi pembayaran, guna meningkatkan ketepatan waktu realisasi anggaran.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi IKPA secara berkala, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Kegiatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3. 13 Realisasi IK-6 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2019-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	89	95,39	95,12	95,32	93,64	92	89,15	92	89,15

2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO	: Capaian RO
PenggunaanSBK	: Penggunaan SBK
NEAlokasi	: Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO	: Bobot Capaian RO
WpenggunaanSBK	: Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi	: Bobot Efisiensi Alokasi

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sebesar 87,50 atau 120% dari 71,5 Dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut:



MONEY STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Role Pilih TA (2025) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	032.13.567094	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	89,15	88,33

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEY KEMENKEU 1.0.0 2026-01-10 20:56:31

Gambar 3. 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 7

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5	87,50	120

Pelaksanaan IKU *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran* pada UPT Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat berhasil. Nilai kinerja perencanaan anggaran yang dicapai sebesar 87,50, atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 71,5, sehingga IKU ini tercapai dan melampaui target.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur, dan selaras dengan kebutuhan program dan kegiatan. Perencanaan anggaran mampu mengakomodasi prioritas organisasi, mendukung pencapaian sasaran kinerja, serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini, dan capaian yang melampaui target menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kualitas perencanaan anggaran di tengah dinamika kebijakan dan keterbatasan sumber daya, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Penguatan koordinasi internal lintas fungsi, khususnya antara perencana, pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan.
2. Penajaman kebutuhan anggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi anggaran lebih fokus pada kegiatan prioritas.
3. Penyesuaian perencanaan anggaran secara responsif, terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
4. Penyempurnaan dokumen perencanaan, agar lebih akurat dan selaras dengan target kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini tercermin dari:

1. Perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran, sehingga meminimalkan kebutuhan revisi anggaran.
2. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran.
3. Optimalisasi sumber daya manusia perencana, tanpa memerlukan tambahan biaya.
4. Dukungan langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi, dengan perencanaan anggaran yang terintegrasi dengan sasaran kinerja.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Mempertahankan penerapan perencanaan anggaran berbasis kinerja, agar alokasi anggaran semakin efektif.
2. Meningkatkan kapasitas SDM perencana, melalui pelatihan dan pembaruan regulasi perencanaan.
3. Memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran, guna mendukung pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran, sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
5. Mengantisipasi dinamika kebijakan anggaran, dengan menyusun perencanaan yang lebih adaptif dan fleksibel.

Kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3. 15 Realisasi IK-7 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	-	97,27	83,09	84,79	94,84	71,5	87,50	71,5	87,50

3. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2025.

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2025}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2025}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sebesar 100% dari 100%. Dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut:

Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

Gambar 3. 5 Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 8

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	100	100

Pelaksanaan IKU *Persentase Penyelesaian Temuan BPK* pada UPT Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat berhasil. Persentase penyelesaian temuan BPK mencapai 100% dari 100%, yang berarti seluruh temuan BPK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. Tidak terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti atau tertunda penyelesaiannya. Dengan demikian, tidak terjadi kegagalan kinerja pada IKU ini, dan capaian yang diperoleh menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengendalian internal.

Dalam rangka memastikan seluruh temuan BPK dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Penetapan rencana aksi (action plan) untuk setiap temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.
2. Koordinasi intensif antara pimpinan, pengelola keuangan, dan unit terkait dalam penyelesaian tindak lanjut.
3. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian temuan.
4. Penyediaan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat, guna mempercepat proses verifikasi tindak lanjut.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyelesaian temuan BPK tercermin dari:

1. Penyelesaian seluruh temuan tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus.
2. Optimalisasi sumber daya manusia internal, khususnya pejabat pengelola keuangan dan aparat pengawasan internal.

3. Pemanfaatan sistem dan mekanisme pengendalian internal yang telah ada, sehingga proses tindak lanjut berjalan efektif.
4. Penyelesaian tepat waktu, yang mencegah potensi risiko lanjutan dan beban administrasi tambahan.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Mempertahankan komitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu.
2. Memperkuat sistem pengendalian internal, guna mencegah terulangnya temuan serupa.
3. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan BMN.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas.
5. Mengintegrasikan hasil tindak lanjut BPK ke dalam perbaikan tata kelola organisasi, sebagai langkah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kegiatan Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3. 17 Realisasi IK-8 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	1	1	1	100	100	100	100	100	100

4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Pada Semester I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 83,33 dari target 75 atau 111,11%. Dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut:



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja...

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	29	23,28	93,12 %	30,34	75,85 %	25	83,33 %	5	100 %	83,62	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	14	21,43	85,72 %	33,14	82,85 %	25	83,33 %	5	100 %	84,57	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	29	23,28	93,12 %	31,26	78,15 %	25,17	83,9 %	5	100 %	84,71	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	14	22,14	88,56 %	31,54	78,85 %	25	83,33 %	5	100 %	83,68	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTONGKONG	7	21,43	85,72 %	25,71	64,28 %	25	83,33 %	5	100 %	77,94	SEDANG
21	BALAI KIPM TANJUNGPINANG	11	22,27	89,08 %	30,75	76,88 %	25	83,33 %	5	100 %	83,02	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	21,07	84,28 %	30,11	75,28 %	25	83,33 %	5	100 %	81,18	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	22	22,73	90,92 %	30,09	75,22 %	27,5	91,67 %	5	100 %	85,32	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	9	23,89	95,56 %	32,25	80,63 %	28,33	94,43 %	5	100 %	89,47	TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	13	20,77	83,08 %	33,15	82,88 %	25	83,33 %	5	100 %	83,92	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	17	22,65	90,6 %	30,49	76,22 %	22,08	73,63 %	4,76	95,2 %	79,96	SEDANG
27	STASIUN KIPM KENDARI	13	21,54	86,16 %	31,79	79,47 %	25	83,33 %	5	100 %	83,33	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAMI	8	24,38	97,52 %	32,31	80,78 %	25	83,33 %	5	100 %	86,68	TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	13	22,31	89,24 %	30,23	75,58 %	25	83,33 %	5	100 %	82,54	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	15	22,33	89,32 %	29,67	74,17 %	25	83,33 %	5	100 %	82	TINGGI

Gambar 3. 6 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester I

Pada Semester II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 83,9 dari target 83 atau 102,32 % Dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut:

IP ASN 2025												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	33	23.64	94.56 %	31.52	78.8 %	25	83.33 %	5	100 %	85.16	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	14	22.5	90 %	33.43	83.58 %	25	83.33 %	5	100 %	85.93	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	29	23.28	93.12 %	33.99	84.97 %	25.17	83.9 %	5	100 %	87.44	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	14	22.5	90 %	34.54	86.35 %	25	83.33 %	5	100 %	87.04	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTIKONG	7	21.43	85.72 %	32.86	82.15 %	25	83.33 %	5	100 %	84.29	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	10	22	88 %	33.58	83.95 %	25	83.33 %	5	100 %	85.58	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	20.71	82.84 %	32.91	82.27 %	25	83.33 %	5	100 %	83.62	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	22	22.73	90.92 %	34.12	85.3 %	27.5	91.67 %	5	100 %	89.35	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	8	23.75	95 %	34.91	87.27 %	28.75	95.83 %	5	100 %	92.41	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	10	20.5	82 %	32.88	82.2 %	25	83.33 %	5	100 %	83.38	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	15	23.33	93.32 %	33	82.5 %	23.33	77.77 %	4.73	94.6 %	84.4	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	12	21.67	86.68 %	32.23	80.58 %	25	83.33 %	5	100 %	83.9	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	9	24.44	97.76 %	35	87.5 %	25	83.33 %	5	100 %	89.44	TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	14	22.5	90 %	31.77	79.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.27	TINGGI

Gambar 3. 7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari Semester II

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 9

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	83	83,9	102,32

Pada Semester I Tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari mencapai 83,33 dari target 75 atau sebesar 111,11%, yang menunjukkan kinerja sangat berhasil dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kompetensi, kinerja, dan integritas ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, pada Semester II Tahun 2025, nilai Indeks Profesionalitas ASN meningkat menjadi 83,90 dari target 83 atau sebesar 102,32%. Meskipun persentase capaian terhadap target relatif menurun dibandingkan Semester I, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan target kinerja pada Semester II. Secara absolut, nilai indeks menunjukkan peningkatan kinerja ASN, yang menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek profesionalitas ASN.

Dengan demikian, tidak terdapat kegagalan kinerja pada IKU ini, dan secara keseluruhan kinerja Indeks Profesionalitas ASN berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Untuk mencapai dan mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas ASN, Stasiun KIPM Kendari telah melaksanakan berbagai langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial.
2. Optimalisasi pengelolaan kinerja ASN, termasuk pengisian dan pemantauan kinerja melalui sistem manajemen kinerja ASN.
3. Pembinaan dan pengawasan disiplin ASN secara berkelanjutan oleh pimpinan unit kerja.
4. Penataan administrasi kepegawaian, termasuk pemutakhiran data ASN sebagai dasar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN tercermin dari:

1. Pemanfaatan sumber daya internal secara optimal, khususnya pejabat pengelola kepegawaian dan atasan langsung ASN.
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi secara selektif dan prioritas, disesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
3. Pemanfaatan metode pembelajaran daring dan internal sharing knowledge, sehingga mengurangi kebutuhan biaya pelatihan.
4. Integrasi kegiatan pembinaan ASN dengan kegiatan rutin organisasi, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN ke depan, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kompetensi ASN, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jabatan.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN secara berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan lanjutan dan sertifikasi.
3. Memperkuat budaya kerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap komponen Indeks Profesionalitas ASN, guna memastikan perbaikan yang berkelanjutan.
5. Menyesuaikan target Indeks Profesionalitas ASN secara bertahap, agar tetap realistis namun menantang.

Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk

perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3. 19 Realisasi IK-9 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	-	73	83,03	89,57	90,83	83	83,9	83	83,9

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sebesar 86,85 (A Memuaskan) atau 100,99% dari 86. Dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut:

31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKIPM T.J. BALAI ASAHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A

Gambar 3. 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 10

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86	86,85	100,99

Pada Tahun 2025, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari mencapai 86,85 dengan predikat A (Memuaskan) atau 100,99% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan sangat baik dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang terintegrasi dan konsisten. Tidak terdapat kegagalan dalam pencapaian indikator ini, dan capaian kinerja menunjukkan kondisi stabil dan terjaga pada kategori memuaskan. Peningkatan kualitas SAKIP juga dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Untuk mencapai nilai Penilaian Mandiri SAKIP yang memuaskan, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan berbagai langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, termasuk penyelarasan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja.
2. Penguatan pengukuran dan pemantauan kinerja, melalui monitoring capaian indikator kinerja secara berkala.
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja, dengan menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja.

4. Pelaksanaan evaluasi internal SAKIP, sebagai sarana identifikasi kelemahan dan perbaikan berkelanjutan.
5. Pendampingan dan koordinasi internal lintas fungsi, untuk memastikan keseragaman pemahaman SAKIP.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SAKIP tercermin dari:

1. Optimalisasi peran tim internal SAKIP, tanpa pembentukan struktur tambahan yang memerlukan biaya besar.
2. Pemanfaatan sistem informasi kinerja yang tersedia, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien.
3. Integrasi kegiatan SAKIP dengan kegiatan manajemen rutin, sehingga tidak menimbulkan beban anggaran tambahan.
4. Pemanfaatan forum koordinasi internal, sebagai sarana peningkatan kapasitas tanpa biaya tambahan yang signifikan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan SAKIP ke depan, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome dan dampak.
2. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, agar lebih efektif dan terukur.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP, melalui pembinaan dan pembelajaran berkelanjutan.
4. Memperkuat pengendalian internal dan evaluasi kinerja, guna menjaga konsistensi penerapan SAKIP.
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP secara berkelanjutan, sebagai dasar peningkatan nilai SAKIP di tahun berikutnya.

Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3. 21 Realisasi IK-10 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	-	-	-	81	81	86	86,85	86	86,85

6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- 1) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II tahun 2023 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.
- 2) Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

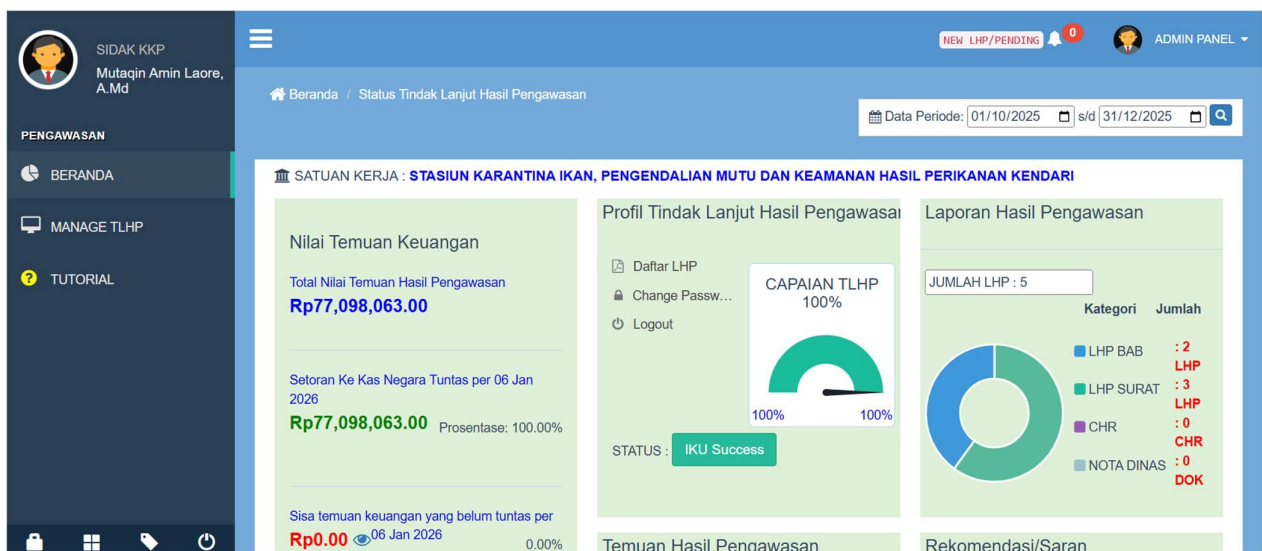
Pengukuran:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dilaksanakan mulai dari triwulan I s.d triwulan IV dan telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) 100%. Dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut:



Gambar 3. 9 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut:

Tabel 3. 22 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 11

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	100	100

Pada Tahun 2025, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dilaksanakan secara berkelanjutan sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara tuntas (status TUNTAS). Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal telah berjalan efektif dan rekomendasi yang diberikan mampu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi. Tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja pada indikator ini, karena seluruh temuan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian 100% juga mencerminkan meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai bagian dari budaya perbaikan berkelanjutan.

Untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat dimanfaatkan secara optimal, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) atas setiap rekomendasi hasil pengawasan, lengkap dengan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.
2. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut secara berkala, sehingga setiap progres dapat dikendalikan dan diselesaikan tepat waktu.
3. Koordinasi intensif antara pimpinan, unit kerja terkait, dan APIP, guna memastikan kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang diberikan.

4. Pendokumentasian bukti tindak lanjut secara tertib dan sistematis, sebagai dasar penetapan status tindak lanjut menjadi TUNTAS.
5. Integrasi hasil pengawasan ke dalam perbaikan SOP dan proses bisnis, sehingga rekomendasi tidak hanya bersifat administratif tetapi berdampak pada peningkatan kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tercermin dari:

1. Optimalisasi sumber daya internal, tanpa memerlukan tambahan tenaga atau biaya khusus.
2. Pemanfaatan forum koordinasi dan rapat internal rutin, sehingga tidak menambah beban anggaran.
3. Penggunaan sistem dan dokumen yang telah tersedia, untuk pemantauan dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi.
4. Penyelarasan tindak lanjut dengan kegiatan rutin unit kerja, sehingga perbaikan kinerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator di masa mendatang, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempertahankan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tepat waktu dan tuntas.
2. Meningkatkan kualitas tindak lanjut agar bersifat preventif, tidak hanya menyelesaikan temuan tetapi mencegah terulangnya permasalahan.
3. Memperkuat sinergi dengan APIP, khususnya dalam pembinaan dan pendampingan pengawasan.
4. Mengintegrasikan rekomendasi hasil pengawasan ke dalam perencanaan dan manajemen kinerja, sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi.
5. Melakukan monitoring berkelanjutan atas efektivitas tindak lanjut, untuk memastikan rekomendasi benar-benar berdampak pada perbaikan kinerja.

Kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3. 23 Realisasi IK-11 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100

7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Pengukuran:

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.



Selama Triwulan I s.d Triwulan IV tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Rekapitulasi Rencana Umum PBJ Terumumkan adalah 100%.

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sesuai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu 76% dilaksanakan setiap akhir triwulan dan telah mencapai realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini telah melebihi target dalam perjanjian kinerja, dan selalu disampaikan melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP tiap triwulan untuk tahun anggaran 2025. Dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut:

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode RD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	PAGU PENGADAAN	Setelah Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000	-	3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALKAPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000	-	1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000	-	935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	294,336,000	-	294,336,000	9,000,000	-	285,336,000	294,336,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	37,3548,000	1,490,331,000	162,390,000	-	1,327,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000	-	2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000	-	605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000	-	888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	299,630,000	-	2,670,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000	-	986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000	-	4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,880,000	-	1,644,059,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000	-	7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-	-	154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJ STANDAR KIPM dan KIP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,382,000	-	3,200,938,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPIH KIP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000	-	8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KIP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000	-	336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KIP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-	-	35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KIP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	86,620,000	-	586,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KIP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000	-	1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KIP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000	-	1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KIP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000	-	411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KIP OROSON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	490,880,000	-	2,650,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KIP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-	-	599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KIP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000	-	117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KIP KUPANG	142,659,700	58,610,000	201,469,700	21,550,000	-	179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KIP MERAU	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000	-	658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KIP MERALUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000	-	754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KIP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	166,960,000	-	1,504,549,000	1,671,509,000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KIP PALANGKARAYA	1,819,998,000	-	1,819,998,000	385,950,000	-	1,434,048,000	1,819,998,000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KIP PALEMBANG	1,474,110,000	-	1,474,110,000	161,490,000	-	1,292,620,000	1,474,110,000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KIP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000	-	412,970,000	474,690,000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KIP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	19,000,000	-	987,732,000	1,006,732,000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KIP POKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000	-	858,989,000	866,989,000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KIP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,255,000	-	1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KIP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-	-	152,919,000	152,919,000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KIP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	106,837,000	-	1,234,834,000	1,341,671,000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358,000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%										
Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
NILAI CAPAIAN										
100.00%										

Gambar 3. 10 Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 12

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76	100	120

Selama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Stasiun KIPM Kendari telah mengumumkan Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP sebesar 100%. Capaian ini melampaui target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 76%, sehingga indikator kinerja ini dinyatakan sangat berhasil.

Keberhasilan tersebut mencerminkan meningkatnya kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengadaan. Seluruh rencana umum pengadaan dapat diumumkan tepat waktu pada setiap akhir triwulan, serta diverifikasi melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang terkait penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

Tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja pada indikator ini. Sebaliknya, capaian 100% menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan, serta konsistensi pelaksanaan dari awal hingga akhir tahun anggaran.

Untuk memastikan ketercapaian indikator ini secara optimal, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan berbagai langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan secara berkala, sesuai kebutuhan riil dan pagu anggaran yang tersedia.
2. Koordinasi intensif antara Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan operator SIRUP, guna memastikan data RUP dapat diumumkan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumuman RUP setiap akhir triwulan, untuk menghindari keterlambatan atau ketidaksesuaian data.

4. Penyesuaian RUP terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, tanpa mengurangi kepatuhan terhadap kewajiban pengumuman pada SIRUP.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini tercermin dari:

1. Pemanfaatan sumber daya manusia yang telah ada, tanpa memerlukan tambahan personel khusus.
2. Penggunaan aplikasi SIRUP sebagai sistem nasional, sehingga proses pengumuman RUP dapat dilakukan secara elektronik, cepat, dan transparan.
3. Integrasi kegiatan penyusunan RUP dengan proses perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan.
4. Optimalisasi koordinasi internal, yang meminimalkan kesalahan penginputan dan kebutuhan perbaikan berulang.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi pengumuman RUP pada SIRUP secara tepat waktu di setiap triwulan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, agar RUP yang diumumkan semakin selaras dengan kebutuhan riil dan prioritas organisasi.
3. Memperkuat kapasitas SDM pengadaan, melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi di bidang PBJ.
4. Melakukan review berkala terhadap RUP, khususnya dalam menghadapi perubahan kebijakan anggaran dan efisiensi pemerintah pusat.
5. Menjaga sinergi dengan Biro Pengadaan Barang KKP, sebagai upaya memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman nasional.

Kegiatan Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.25 berikut ini:

Tabel 3. 25 Realisasi IK-12 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	-	-	76,21	78,28	84,34	76	100	76	100

8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Cara Pengukuran:

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 75,95 atau 108,50% dari Target 70% sesuai Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Hal Hasil Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025. Dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut:

**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
WBK
UNIT KERJA: STASIUN KIPM KENDARI**

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	Persentase	Pemenuhan Nilai Min
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	4,44	6,88	11,32	75,44%	OK
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,99	3,76	7,76	77,57%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					45,95	76,58%	OK
B. HASIL		40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			16,88	75,00%	OK
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			13,13	75,00%	OK
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75	75,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			13,13	75,00%	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			13,13	75,00%	OK
TOTAL HASIL					30,00	75,00%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					75,95		OK

Gambar 3. 11 Pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 13

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	75,95	108,50

Pada Tahun 2025, Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari mencapai 75,95% atau 108,50% dari target sebesar 70%, sehingga indikator kinerja ini dinyatakan tercapai dan melampaui target. Capaian ini didasarkan pada Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025.

Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola organisasi, khususnya dalam pemenuhan kelengkapan dokumen enam area perubahan Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selama tahun pelaporan tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja yang signifikan pada indikator ini. Capaian yang melebihi target mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Stasiun KIPM Kendari dalam mendukung pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan ketercapaian indikator ini, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa langkah dan alternatif solusi, antara lain:

1. Pembentukan dan penguatan Tim Pembangunan Zona Integritas, yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dan pemenuhan dokumen ZI.
2. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen ZI secara berkala, menyesuaikan dengan pedoman dan indikator penilaian terbaru.
3. Pendampingan internal dan koordinasi intensif dengan unit pembina di lingkup BPPMHKP.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung ZI.
5. Penyesuaian strategi pemenuhan dokumen terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini tercermin melalui:

1. Optimalisasi sumber daya manusia internal, tanpa penambahan personel khusus.
2. Pemanfaatan dokumen kinerja yang telah tersedia (SAKIP, LKj, IKPA, RUP, pengawasan, dan pelayanan publik) sebagai dokumen pendukung ZI.
3. Penggunaan sistem digital dan aplikasi pendukung, sehingga meminimalkan biaya administrasi dan penggandaan dokumen.
4. Sinergi lintas fungsi, yang mengurangi duplikasi pekerjaan antar unit kerja.

Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pembangunan Zona Integritas pada tahun berikutnya, Stasiun KIPM Kendari melakukan dan merekomendasikan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas substansi dokumen ZI, tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif tetapi juga pada dampak implementasi.
2. Memperkuat internalisasi budaya integritas dan anti korupsi kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan data dukung secara digital, agar lebih tertib, mudah ditelusuri, dan siap saat proses penilaian.
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit pembina dan evaluator, guna memperoleh masukan perbaikan secara lebih dini.
5. Menjadikan hasil penilaian ZI sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi, khususnya pada area yang masih memerlukan penguatan menuju WBK/WBBM.

Kegiatan Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.27 berikut ini:

Tabel 3. 27 Realisasi IK-13 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	-	-	-	-	-	70	75,95	70	75,95

9. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pengukuran:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai SKM adalah 86,69 atau 98,51% dari Target 88 sehingga belum tercapai.

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai SKM adalah 93,77 atau 106,56% dari Target 88 sehingga tercapai.

Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai SKM adalah 96,43 atau 109,58% dari Target 88 sehingga tercapai

Total Nilai: $3.91+3.94+3.91+3.91+3.91+3.91+3.94+3.91+3.97=35.31$

Rata-rata: $35.31/9 \approx 3.923$

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), rata-rata dikonversi ke skala 100 dengan cara mengalikan rata-rata skor dengan nilai dasar 25.

Perhitungan: $3.9225 \times 25 = 98.06$

Sehingga ada Triwulan IV tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai SKM adalah 3,923 atau 116,75% dari Target 3,36 sehingga tercapai.

Untuk target dan capaian realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IK 14

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Terhadap Target 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	3,36	3,923	116,75

Pada Tahun 2025, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari menunjukkan tren peningkatan kinerja yang signifikan pada setiap triwulan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Nilai SKM sebesar 86,69 atau 98,51% dari target 88, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya masukan masyarakat terkait kecepatan pelayanan dan konsistensi informasi layanan pada awal tahun anggaran.

Selanjutnya, pada Triwulan II Tahun 2025, Nilai SKM meningkat menjadi 93,77 atau 106,56% dari target 88, sehingga indikator kinerja dinyatakan tercapai. Peningkatan kinerja ini berlanjut pada Triwulan III Tahun 2025 dengan Nilai SKM sebesar 96,43 atau 109,58% dari target 88, yang menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan hasil pengolahan 9 unsur pelayanan dengan total nilai 35,31 dan nilai rata-rata 3,923, yang dikonversi ke skala 100 menghasilkan Nilai IKM sebesar 98,06. Dengan demikian, Nilai SKM pada Triwulan IV adalah 3,923 atau 116,75% dari target 3,36, sehingga indikator kinerja dinyatakan tercapai dan melampaui target.

Secara keseluruhan, meskipun pada awal tahun terdapat capaian yang belum memenuhi target, namun hingga akhir tahun 2025 kinerja pelayanan publik Stasiun KIPM Kendari menunjukkan perbaikan berkelanjutan dan capaian yang sangat baik.

Sebagai tindak lanjut atas hasil SKM, khususnya pada Triwulan I yang belum mencapai target, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Melakukan evaluasi hasil SKM secara internal, untuk mengidentifikasi unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan.
2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan, khususnya pada layanan sertifikasi dan administrasi.
3. Memperbaiki penyampaian informasi layanan, baik melalui media informasi di kantor layanan maupun media digital.
4. Meningkatkan sikap dan perilaku pelayanan petugas, melalui penguatan budaya pelayanan prima.
5. Menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat secara langsung, sebagai bahan perbaikan layanan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini ditunjukkan melalui:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan yang telah tersedia, tanpa memerlukan investasi tambahan yang signifikan.
2. Pelaksanaan SKM secara mandiri, dengan memaksimalkan peran petugas layanan dan tim pengelola SKM internal.
3. Penggunaan media digital dalam pengumpulan data SKM, sehingga mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pengolahan data.
4. Integrasi hasil SKM dengan evaluasi kinerja layanan, sehingga hasil survei dapat langsung dimanfaatkan untuk perbaikan tanpa proses tambahan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, Stasiun KIPM Kendari melakukan serta merekomendasikan beberapa upaya perbaikan kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan SKM secara konsisten dan berkelanjutan pada setiap triwulan, sebagai dasar evaluasi layanan.
2. Menindaklanjuti hasil SKM secara lebih sistematis, dengan menyusun rencana aksi per unsur pelayanan.

3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan, terutama dalam aspek komunikasi dan pelayanan prima.
4. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, guna meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan.
5. Menjadikan hasil SKM sebagai salah satu indikator utama perbaikan kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak terdapat kendala sehingga dalam prosesnya kegiatan berjalan lancar. Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2019-2024 ditampilkan pada tabel 3.29 berikut ini:

Tabel 3. 29 Realisasi IK-14 Tahun 2020-2025 dan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Realisasi					2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	-	-	89,21	91,80	95,24/ 3,81	88/3,36	96,43 /3,92	88/3,36	96,43 /3,92

3.3 REALISASI ANGGARAN

Terjadi perubahan nilai Pagu anggaran karena adanya revisi anggaran pergeseran belanja pegawai antar uni eselon I dan buka blokir belanja efisiensi tahun anggaran 2025 semula Rp. 8.016.256.000 menjadi Rp. 7,113,219,000 sehingga Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kendari sampai Triwulan IV Tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6,745,706,450 atau mencapai 94,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7,113,219,000, berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 3.30 dan Tabel 3.31 berikut ini:

Tabel 3. 30 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4,296,511,000	4,183,685,126	97.37
Belanja Barang	2,816,708,000	2,562,021,324	90,96
Belanja Modal	0	0	0
TOTAL	7,113,219,000	6,745,706,450	94.83

Tabel 3. 31 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian Mutu	242,380,000	81,356,400	33,57
Manajemen Mutu	200,000,000	173,177,000	86,59
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6,670,839,000	6,491,173,050	97.31
TOTAL	7,113,219,000	6,745,706,450	94.83

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Selama Tahun 2025, Stasiun KIPM Kendari telah melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian output kegiatan, serta realisasi anggaran sebagai bagian dari penerapan *early warning system* kinerja. Pemantauan ini menjadi dasar evaluasi kinerja tahun berjalan sekaligus bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025 telah tercapai bahkan sebagian besar melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari:

1. Capaian IKU teknis dan layanan publik yang menunjukkan tren positif dan berkelanjutan, antara lain Nilai SKM yang meningkat hingga Triwulan IV, rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima negara tujuan ekspor tanpa penolakan, serta peningkatan penerapan sistem penjaminan mutu melalui sertifikasi dan pengawasan.
2. Capaian IKU tata kelola dan akuntabilitas kinerja, seperti Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, serta Persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP yang seluruhnya mencapai atau melampaui target.
3. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas, yang ditunjukkan dengan persentase pemenuhan dokumen ZI di atas target serta komitmen berkelanjutan menuju WBK/WBBM.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 masih dijumpai beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian di atas 100%, yang mengindikasikan bahwa target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi capaian dan sumber daya yang tersedia;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, baik pada Semester I maupun Semester II Tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya penyesuaian

- terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, keterbatasan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, serta perlunya peningkatan ketepatan waktu dan kualitas administrasi pelaksanaan anggaran;
3. Pelaksanaan efisiensi anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat menyebabkan adanya keterbatasan dukungan anggaran pada beberapa kegiatan, meskipun tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian output dan target kinerja;
 4. Pada awal tahun anggaran (Triwulan I) masih terdapat beberapa indikator layanan yang belum mencapai target, namun telah dilakukan langkah perbaikan secara bertahap sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.

4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, tantangan ke depan yang dihadapi Stasiun KIPM Kendari semakin kompleks, seiring dengan:

- meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
- meningkatnya lalu lintas produk perikanan dan ekspor;
- perkembangan teknologi produksi dan distribusi hasil perikanan;
- tuntutan penerapan standar mutu dan keamanan pangan yang semakin ketat;
- serta kebutuhan peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia.

Kondisi tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan beban kerja, kompleksitas tugas, kebutuhan SDM aparatur yang profesional, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja berkelanjutan, Stasiun KIPM Kendari menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan penetapan target IKU
Target kinerja akan ditetapkan secara lebih realistis dan menantang dengan berbasis pada capaian historis, potensi beban kerja, serta proyeksi kebutuhan pelayanan. Perencanaan kinerja akan diintegrasikan secara lebih kuat dengan penganggaran berbasis kinerja.
2. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik
Monitoring dan evaluasi kinerja akan terus dilaksanakan secara bulanan dan triwulanan sebagai *early warning system*, sehingga setiap deviasi capaian

dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur.

3. Optimalisasi efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi anggaran dan sumber daya akan terus dijaga melalui optimalisasi SDM internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi kegiatan lintas fungsi tanpa mengurangi kualitas output dan layanan.
4. Peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan terus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan, dengan fokus pada kecepatan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, dan sikap pelayanan petugas.
5. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan integritas organisasi
Upaya peningkatan Nilai SAKIP, IKPA, kinerja perencanaan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pembangunan Zona Integritas akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan.
6. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung
Peningkatan kompetensi aparatur, profesionalitas ASN, serta kesiapan sarana prasarana laboratorium dan lembaga inspeksi akan terus diupayakan guna mendukung pemenuhan standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Stasiun KIPM Kendari diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih pada Tahun 2025 serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, perlindungan sumber daya hayati perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76
		13.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	88

**Data Anggaran**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7,749,239,000
2.	Manajemen Mutu	149,000,000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	305,000,000
Total Anggaran Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025		8,203,239,000

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	82
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	3,36

**Data Anggaran**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6,670,839,000
2.	Manajemen Mutu	200,000,000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	242,380,000
Total Anggaran Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025		7,113,219,000